

Analisis Dampak Ekonomi Digital Terhadap Masyarakat dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia



Zainuddin ^{1,*}, Mita Sari ², Ayu Puspita ³

¹ Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram, Indonesia

^{2,3} Program Studi Ekonomi Syariah, UIN Mataram, Mataram, Indonesia

* Corresponding author email: zainuddinn@gmail.com

ABSTRACT

Transformasi digital telah mengubah lanskap perekonomian global, termasuk Indonesia. Ekonomi digital menciptakan peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Artikel ini menganalisis bagaimana ekonomi digital mempengaruhi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2025 melalui studi literatur dan data sekunder. Hasil kajian menunjukkan bahwa ekonomi digital memberikan dampak positif terhadap inklusi keuangan, penciptaan lapangan kerja, serta efisiensi dalam transaksi ekonomi. Namun, tantangan seperti kesenjangan digital dan regulasi yang belum optimal masih menjadi hambatan.

Article History

Received 2025-05-16

Revised 2025-05-23

Accepted 2025-05-25

Keywords

Ekonomi Digital,
Pertumbuhan
Ekonomi

Copyright © 2025, The Author(s)

This is an open-access article under the CC-BY-SA license



PENDAHULUAN

Ekonomi digital merujuk pada kegiatan ekonomi yang didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi, terutama internet. Di Indonesia, pertumbuhan ekonomi digital sangat pesat, didorong oleh adopsi teknologi digital oleh pelaku usaha dan masyarakat. McKinsey & Company (2020) mencatat bahwa ekonomi digital Indonesia berpotensi mencapai nilai USD 130 miliar pada tahun 2025. Perubahan ini tidak hanya berdampak pada sektor bisnis, tetapi juga terhadap struktur sosial dan ekonomi masyarakat. Digitalisasi telah mendorong inovasi dalam berbagai sektor, mulai dari perdagangan hingga pelayanan publik.

Salah satu dampak paling signifikan dari ekonomi digital adalah terhadap sektor perdagangan melalui munculnya e-commerce. Platform seperti Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak memungkinkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) menjangkau pasar nasional bahkan global tanpa harus memiliki toko fisik. Google, Temasek, dan Bain & Company (2022) melaporkan bahwa sektor e-commerce menyumbang hampir 60% dari total nilai ekonomi digital di Indonesia, menunjukkan pentingnya platform digital dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Selain perdagangan, sektor keuangan juga mengalami transformasi besar melalui layanan financial technology (fintech). Fintech mempermudah akses masyarakat terhadap layanan keuangan seperti pinjaman, pembayaran, dan investasi, terutama bagi mereka yang sebelumnya tidak terjangkau oleh layanan perbankan konvensional. Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2021) mencatat bahwa lebih dari 70% masyarakat dewasa di Indonesia telah menggunakan layanan keuangan digital, yang menunjukkan bahwa ekonomi digital turut berperan dalam meningkatkan inklusi keuangan nasional.

Digitalisasi juga mendorong terciptanya jenis pekerjaan baru dan membuka peluang bagi ekonomi berbasis gig (gig economy), seperti ojek online, jasa freelance, dan pekerja lepas berbasis platform. Hal ini memberikan fleksibilitas bagi tenaga kerja dan mengurangi angka pengangguran, terutama di kalangan anak muda. Menurut laporan World Bank (2021), ekonomi digital di Indonesia mampu menciptakan jutaan pekerjaan baru dalam dekade mendatang jika didukung dengan kebijakan dan pendidikan digital yang memadai.

Namun, pertumbuhan ekonomi digital tidak selalu merata. Ketimpangan digital antara wilayah perkotaan dan pedesaan menjadi tantangan serius. Akses internet yang belum merata, terutama di wilayah timur Indonesia, membuat sebagian masyarakat belum dapat menikmati

manfaat ekonomi digital. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo, 2022) mencatat bahwa masih terdapat lebih dari 12.000 desa yang belum memiliki akses internet memadai, yang menghambat potensi transformasi digital secara menyeluruh.

Tantangan lainnya adalah rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat. Banyak pengguna internet yang belum memahami secara optimal cara menggunakan teknologi secara produktif dan aman. Hal ini meningkatkan risiko terhadap penipuan daring, pelanggaran privasi, serta penyalahgunaan data pribadi. Sebuah studi dari Katadata Insight Center (2022) menunjukkan bahwa hanya 35% pengguna internet di Indonesia yang memiliki pemahaman literasi digital yang baik, yang berarti edukasi digital menjadi kebutuhan mendesak.

Di sisi lain, regulasi dan kebijakan pemerintah masih perlu beradaptasi lebih cepat terhadap dinamika ekonomi digital. Banyak regulasi yang belum responsif terhadap model bisnis baru, seperti layanan ride-hailing, platform e-commerce lintas negara, dan fintech berbasis blockchain. Menurut World Economic Forum (2021), kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil diperlukan untuk menciptakan ekosistem digital yang inklusif, aman, dan berkelanjutan.

Dengan segala potensi dan tantangannya, ekonomi digital di Indonesia tetap memiliki prospek cerah. Dukungan infrastruktur, peningkatan literasi digital, serta regulasi yang adaptif akan menjadi kunci utama dalam memastikan bahwa manfaat ekonomi digital dapat dirasakan secara luas oleh seluruh lapisan masyarakat. Jika potensi ini dimaksimalkan, maka ekonomi digital dapat menjadi pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Ekonomi Digital

Ekonomi digital pertama kali diperkenalkan oleh Tapscott. Menurutnya, ekonomi digital merupakan sebuah fenomena sosial yang mempengaruhi sistem ekonomi, dimana fenomena tersebut mempunyai karakteristik sebagai sebuah ruang intelijen, meliputi informasi, berbagai akses terhadap instrument informasi, kapasitas informasi dan pemrosesan informasi. Komponen ekonomi digital yang berhasil diidentifikasi pertama kalinya yaitu industri TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi), aktivitas e-commerce, serta distribusi digital barang dan jasa (Tapscott, 1997).

Sistem Pembayaran Non Tunai

Sistem pembayaran non tunai merupakan sebuah sistem pembayara tanpa memakai uang tunai. Sistem ini mulai diperkenalkan pada transaksi ritel sejak tahun 1990-an. Ini bukan sebagai pengganti sistem dari pembayaran tunai, namun saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Sistem pembayaran non tunai dalam penggunaannya melibatkan jasa perbankan selaku usaha menghimpun dana masyarakat selayaknya memberikan pelayanan lalu lintas pembayaran yang dapat membantu dalam kebutuhan ekonomi nasabah (Mulyati 2003).

Uang Elektronik

Menurut Bank Indonesia, uang elektronik didefinisikan sebagai alat pembayaran dalam bentuk elektronik dimana nilai uangnya disimpan dalam media elektronik tertentu. Media elektronik untuk menyimpan nilai uang elektronik dapat berupa chip atau server. Penggunaan uang elektronik ini sebagai alat pembayaran yang inovatif dan praktis diharapkan dapat membantu kelancaran pembayaran kegiatan ekonomi yang bersifat massal, cepat dan mikro, sehingga perkembangannya dapat membantu kelancaran transaksi di jalan tol, di bidang transportasi seperti kereta api maupun angkutan umum lainnya atau transaksi di minimarket, food court, atau parkir.

E-Commerce

Electronic Commerce (E-Commerce) berdasarkan *Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) 2009* adalah penjualan atau pembelian barang/jasa, yang dilakukan melalui jaringan komputer dengan metode yang secara spesifik dirancang untuk tujuan menerima atau melakukan pesanan, tetapi pembayaran dan pengiriman utama

barang/jasa tidak harus dilakukan secara online. Transaksi *e-commerce* dapat terjadi antar usaha, rumah tangga, individu, pemerintah, dan organisasi swasta atau publik lainnya. Menurut Musnaini (2020) beberapa jenis *e-commerce* yang ada di Indonesia, diantaranya adalah *Business to Business (B2B)*, *Business to Consumers (B2C)*, *Consumer to Business (C2B)*, *Consumer to Consumer (C2C)*, *Business to Administration (B2A)*, *Online to Offline (O2O)*.

Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemajuan Teknologi

Pertumbuhan ekonomi secara singkat diartikan sebagai proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses, bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat (*one shoot*). Aspek dinamis dari suatu perekonomian, yaitu melihat suatu perekonomian sebagai sesuatu yang berkembang atau berubah dari waktu ke waktu (Budiono 1992 :1). Menurut Simon Kuznets pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukannya. Perubahan teknologi dianggap sebagai faktor paling penting di dalam proses pertumbuhan ekonomi. Perubahan itu berkaitan dengan perubahan di dalam metode produksi yang merupakan hasil pembaharuan atau hasil dari teknik penelitian baru. (M.L. Jhingan, 2014).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik studi literatur untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai pengaruh ekonomi digital di Indonesia tahun 2025. Data yang digunakan bersumber dari data sekunder, yaitu laporan pemerintah, hasil survei nasional, jurnal ilmiah, laporan lembaga riset internasional, dan publikasi dari sektor swasta yang relevan. Metode ini dipilih karena mampu menggali berbagai perspektif dan dinamika ekonomi digital dari berbagai sumber yang kredibel. Fokus utama penelitian diarahkan pada tiga aspek: kontribusi ekonomi digital terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, dampaknya terhadap kesejahteraan dan inklusi sosial masyarakat, serta tantangan-tantangan kebijakan yang mengiringi perkembangan pesat teknologi digital di Indonesia.

Dalam proses analisis, data dikaji secara sistematis untuk mengidentifikasi pola, perbandingan, serta keterkaitan antara perkembangan digital dengan perubahan sosial-ekonomi. Studi ini memperhatikan bagaimana *e-commerce*, *fintech*, dan *platform digital* lainnya memperluas akses terhadap pasar dan layanan keuangan. Selain itu, perhatian juga diberikan pada peran kebijakan pemerintah dalam memperkuat infrastruktur digital dan menciptakan regulasi yang adaptif. Ketimpangan akses digital dan literasi teknologi turut menjadi variabel penting dalam menganalisis sejauh mana ekonomi digital menciptakan peluang versus memperlebar kesenjangan. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat memberikan gambaran menyeluruh atas pergeseran ekonomi Indonesia menuju era digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertumbuhan Ekonomi Dan Inovasi

Ekonomi digital telah menjadi motor utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, terutama sejak percepatan transformasi digital yang dipicu oleh pandemi COVID-19. Teknologi digital memungkinkan efisiensi di berbagai lini produksi dan distribusi, serta mempercepat inovasi produk dan layanan. Inovasi ini tidak hanya terjadi di sektor teknologi informasi, tetapi juga merambah ke sektor tradisional seperti pertanian, perikanan, dan manufaktur melalui penggunaan Internet of Things (IoT), big data, dan kecerdasan buatan (AI).

Laporan Google, Temasek, dan Bain & Company (2022) mencatat bahwa ekonomi digital Indonesia merupakan yang terbesar di Asia Tenggara, dengan nilai mencapai USD 77 miliar pada tahun 2022 dan diproyeksikan terus tumbuh hingga USD 130 miliar pada tahun 2025. Kontribusi signifikan terhadap PDB datang dari sektor e-commerce, layanan keuangan digital (*fintech*), dan transportasi berbasis aplikasi. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi tidak hanya menjadi alat bantu, tetapi juga penggerak utama dalam menciptakan nilai tambah ekonomi nasional.

Kontribusi ekonomi digital juga terlihat dari peranannya dalam memperkuat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Melalui platform digital seperti Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak, UMKM kini memiliki akses ke pasar nasional bahkan internasional tanpa memerlukan infrastruktur fisik yang besar. Studi dari McKinsey & Company (2020) menunjukkan bahwa pelaku UMKM yang terhubung dengan platform digital memiliki peluang peningkatan pendapatan 1,5 kali lebih tinggi dibandingkan UMKM yang tidak digital. Ini menunjukkan pentingnya digitalisasi sebagai strategi peningkatan daya saing pelaku usaha kecil di era globalisasi.

Selain mendorong pertumbuhan ekonomi, ekonomi digital juga mempercepat penciptaan ekosistem inovasi. Banyak perusahaan rintisan (startup) di Indonesia berkembang pesat dalam ekosistem digital ini, terutama di bidang teknologi finansial, pendidikan digital, dan kesehatan digital. Fenomena ini memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pusat ekonomi digital di kawasan Asia Pasifik. Perkembangan startup unicorn seperti Gojek, Tokopedia, dan Traveloka merupakan bukti nyata bahwa ekosistem digital Indonesia mampu menciptakan inovasi berskala besar.

Namun demikian, pertumbuhan ekonomi digital yang cepat juga menuntut kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia yang memadai. Pemerintah perlu memastikan bahwa investasi dalam jaringan internet, pusat data, dan pendidikan teknologi dapat mengikuti laju pertumbuhan ekonomi digital. Tanpa dukungan tersebut, potensi besar ekonomi digital dapat terhambat oleh hambatan struktural dan kesenjangan teknologi antarwilayah. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil menjadi sangat penting untuk menjamin pertumbuhan ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan.

Dampak Terhadap Masyarakat

Transformasi digital telah membawa perubahan mendasar dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia. Salah satu dampak paling nyata adalah peningkatan inklusi keuangan, yaitu akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang sebelumnya sulit dijangkau. Melalui dompet elektronik (e-wallet), layanan perbankan digital, dan pinjaman peer-to-peer (P2P lending), masyarakat kini dapat melakukan transaksi, menabung, hingga memperoleh pembiayaan hanya melalui gawai pintar. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2021), lebih dari 70% masyarakat dewasa di Indonesia telah mengakses layanan keuangan digital, yang menunjukkan kemajuan signifikan dalam pemerataan layanan keuangan.

Peningkatan inklusi keuangan ini memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat, terutama di daerah-daerah yang sebelumnya tidak terjangkau layanan perbankan konvensional. Dengan adanya layanan keuangan digital, pelaku UMKM, petani, dan pekerja informal dapat memperoleh modal usaha tanpa melalui prosedur perbankan yang rumit. Laporan Bank Dunia (2021) menunjukkan bahwa digitalisasi keuangan berperan dalam pengurangan kemiskinan karena memberikan masyarakat akses terhadap sistem ekonomi yang lebih formal dan aman. Selain itu, masyarakat juga lebih mampu mengelola keuangan pribadi melalui fitur-fitur aplikasi keuangan yang edukatif.

Ekonomi digital juga memfasilitasi munculnya lapangan kerja baru dan model kerja yang fleksibel melalui gig economy. Platform seperti Gojek dan Grab tidak hanya menyediakan layanan transportasi dan pengiriman, tetapi juga menciptakan peluang pendapatan bagi jutaan mitra pengemudi dan pelaku usaha kecil. Model ini memberikan fleksibilitas waktu kerja, terutama bagi generasi muda dan mereka yang sebelumnya tidak memiliki pekerjaan tetap. Studi oleh Katadata Insight Center (2022) menyatakan bahwa lebih dari 30% pekerja digital merasa taraf hidup mereka meningkat sejak bergabung dalam ekosistem ekonomi digital.

Namun demikian, tidak semua kelompok masyarakat dapat menikmati manfaat ekonomi digital secara merata. Kesenjangan akses digital antara wilayah perkotaan dan pedesaan masih menjadi masalah struktural. Data Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo, 2022) menunjukkan bahwa lebih dari 12.000 desa di Indonesia belum memiliki akses internet yang memadai. Hal ini menyebabkan kesenjangan dalam partisipasi ekonomi digital, khususnya di wilayah Indonesia bagian timur. Selain itu, kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas sering kali belum mendapatkan dukungan memadai untuk terlibat secara aktif dalam ekosistem digital.

Selain hambatan akses, rendahnya literasi digital juga menjadi tantangan besar. Banyak masyarakat yang sudah menggunakan internet namun belum memahami aspek keamanan siber, etika digital, dan potensi penyalahgunaan data. Hal ini membuka peluang terjadinya penipuan daring, penyebaran hoaks, dan pelanggaran privasi. Menurut survei Katadata Insight Center (2022), hanya 35% pengguna internet Indonesia yang memiliki tingkat literasi digital tinggi. Oleh karena itu, perlu ada upaya kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk meningkatkan literasi digital sebagai fondasi partisipasi masyarakat dalam ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan.

Tantangan Dan Risiko

Di balik berbagai peluang yang ditawarkan, ekonomi digital juga membawa sejumlah tantangan dan risiko yang tidak dapat diabaikan. Salah satu isu utama adalah masalah keamanan data dan perlindungan privasi. Seiring meningkatnya aktivitas digital masyarakat, jumlah data pribadi yang beredar juga melonjak tajam. Tanpa pengamanan yang memadai, data tersebut rentan terhadap pencurian, penyalahgunaan, dan serangan siber. Beberapa kasus kebocoran data besar di Indonesia menunjukkan bahwa sistem keamanan digital belum sepenuhnya siap menghadapi ancaman-ancaman tersebut. Hal ini menimbulkan keresahan publik dan menuntut perhatian serius dari pemangku kepentingan.

Selain isu keamanan, persoalan privasi juga menjadi sorotan penting. Banyak platform digital yang mengumpulkan, menyimpan, dan memproses data pengguna untuk tujuan komersial tanpa transparansi yang memadai. Praktik ini berpotensi melanggar hak privasi pengguna, terutama ketika data digunakan untuk profilisasi tanpa persetujuan eksplisit. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang disahkan pada 2022 menjadi langkah awal penting, namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan teknis dan kelembagaan (Kominfo, 2022). Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang tegas dan edukasi publik terkait hak-hak digital.

Tantangan lain yang signifikan adalah kecenderungan terjadinya monopoli oleh platform digital berskala besar. Beberapa perusahaan teknologi global dan domestik memiliki posisi dominan dalam ekosistem digital Indonesia, sehingga berpotensi menghambat persaingan sehat dan mengurangi peluang bagi pelaku usaha kecil. Misalnya, model bisnis yang berbasis pada algoritma tertutup dapat menciptakan ketimpangan akses antara penjual besar dan kecil di platform e-commerce. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran akan konsentrasi kekuatan ekonomi pada segelintir entitas digital, yang dalam jangka panjang dapat merugikan keberagaman pasar dan konsumen.

Regulasi yang belum responsif terhadap dinamika teknologi menjadi hambatan tersendiri bagi inovasi dan perlindungan hak publik. Banyak model bisnis baru, seperti layanan berbasis blockchain, ekonomi berbagi (sharing economy), dan teknologi kecerdasan buatan, belum memiliki kerangka regulasi yang jelas. Menurut laporan World Bank (2021), reformasi kebijakan diperlukan untuk menciptakan ekosistem digital yang adil dan inklusif, termasuk penyederhanaan birokrasi, perlindungan pelaku usaha kecil, dan fasilitasi inovasi berbasis teknologi. Tanpa regulasi yang adaptif, Indonesia berisiko tertinggal dalam kompetisi ekonomi digital global.

Terakhir, tantangan sumber daya manusia juga menjadi penghambat dalam optimalisasi potensi ekonomi digital. Kurangnya tenaga kerja dengan keterampilan digital, baik teknis maupun manajerial, menjadi masalah serius di berbagai sektor. Survei World Economic Forum (2021) mengungkapkan bahwa Indonesia masih menghadapi kesenjangan keterampilan digital yang signifikan, khususnya dalam bidang data science, keamanan siber, dan pengembangan perangkat lunak. Untuk mengatasi hal ini, dibutuhkan sinergi antara lembaga pendidikan, dunia usaha, dan pemerintah dalam membangun ekosistem pelatihan dan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan era digital.

KESIMPULAN

Ekonomi digital telah menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam satu dekade terakhir. Manfaatnya tercermin dari peningkatan efisiensi rantai nilai produksi, terbukanya peluang ekonomi baru, hingga perluasan akses terhadap layanan publik dan keuangan formal. Melalui platform digital, pelaku UMKM kini dapat menjangkau konsumen

lebih luas, sementara masyarakat di daerah terpencil memiliki akses terhadap layanan keuangan dan pendidikan yang sebelumnya terbatas. Ekosistem digital juga menciptakan jenis-jenis pekerjaan baru yang lebih fleksibel dan berbasis teknologi, sehingga mendukung peningkatan kesejahteraan dan produktivitas tenaga kerja.

Meski demikian, manfaat ekonomi digital belum dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Ketimpangan akses infrastruktur digital, rendahnya tingkat literasi digital, serta belum matangnya regulasi menjadi tantangan utama yang perlu segera diatasi. Pembangunan infrastruktur digital di wilayah tertinggal, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta penyesuaian kebijakan yang responsif terhadap perkembangan teknologi merupakan langkah krusial untuk memastikan transformasi digital yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil menjadi kunci agar ekonomi digital benar-benar dapat menjadi alat pemerataan kesejahteraan dan kemajuan bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, F. (2024). Dampak Ekonomi Digital Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Benefit: Journal of Bussiness, Economics, and Finance*, 2(1), 27-35.
- Aprilia, N. D. (2021). Perkembangan Ekonomi Digital Indonesia. *Ekonomi Pertahanan*, 7(2), 245-259.
- Bank Dunia. (2021). Indonesia Digital Economy Assessment: Technical Report. Washington, DC: World Bank Group. Retrieved from <https://www.worldbank.org>
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2022). Laporan Tahunan Ekonomi Digital Indonesia.
- Maghfiroh, F. M. S., Natalina, S. A., & Efendi, R. (2023). Transformasi ekonomi digital: Connection integration e-commerce dan s-commerce dalam upaya perkembangan ekonomi berkelanjutan. *Proceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy*, 2(1), 1-10.
- Maharani, S., & Ulum, M. (2019). Ekonomi Digital: Peluang Dan Tantangan Masa Depan Terhadap Ekonomi Syariah Di Indonesia. In *Conference on Islamic Studies FAI 2019* (pp. 1-11).
- Maria, N. S. B., & Widayati, T. (2020). Dampak perkembangan ekonomi digital terhadap perilaku pengguna media sosial dalam melakukan transaksi ekonomi. *JKBM (Jurnal Konsep Bisnis Dan Manajemen)*, 6(2), 234-239.
- McKinsey & Company. (2020). The digital archipelago: How online commerce is driving Indonesia's economic development.
- Nabila, H. N., Chaidir, T., & Suprapti, I. A. P. (2022). Analisis pengaruh ekonomi digital terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2017-2021. *Jurnal Konstanta*, 1(2).
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2021). Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2021.
- Sari, N. A. (2019). Pengaruh perkembangan ekonomi digital terhadap pendapatan pelaku usaha UMKM di Kota Makassar (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Makassar).
- World Bank. (2021). Indonesia Digital Economy Assessment: Technical Report. Washington, DC: World Bank Group. Retrieved from <https://www.worldbank.org>
- World Economic Forum. (2021). Advancing Digital Inclusion in Asia-Pacific: Executive Summary. Geneva: WEF. Retrieved from <https://www.weforum.org>